

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu paradigma yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat internasional dalam bentuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan hidup. Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diukur melalui 241 indikator dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 dengan memperhatikan kelangsungan hidup manusia, alam dan lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) ini diselenggarakan pada tanggal 25 September 2015 dan dihadiri oleh 193 negara-negara di dunia sebagai suatu bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan agenda pembangunan global. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) juga merupakan keberlanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen dari agenda Sustainable Development Goals tersebut kemudian tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 70/1 dan menghasilkan “ *Outcome Document of the United Nations Summit for the Adaption of the Post-2015 Development Agenda*”: (*Transforming Our World: The Agenda For Sustainable Development Goals*). Secara sederhana dokumen dari hasil pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam “*United*

Nations Outcome Document On Sustainable Development Goals” dapat diartikan sebagai berikut: “Alongside continuing development priorities such as: poverty eradication, health, education dan food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promise more peaceful and inclusive societies. It also crucially defines means of implementations.”

Dalam pembentukan agenda SDGs tersebut Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan pada (*High Level Panel of Eminent Persons*). Panel ini merupakan panel ahli yang dibentuk oleh sekjen PBB dengan tujuan untuk memberikan masukan tentang Agenda Global pasca tahun 2015. Pada panel ini Indonesia diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan beberapa perwakilan dari negara lain seperti Presiden Liberia, PM Inggris dan lainnya. Selama pertemuan berlangsung Indonesia selalu berperan aktif dalam pembahasan berbagai isu di tingkat global, dimana Indonesia berkesempatan mengikuti *Open Working Group on Sustainable Development Goals* untuk mendiskusikan 27 isu yang telah dituangkan dalam Laporan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB (Rio+20) pada tahun 2012. Disamping itu Indonesia juga ditunjuk sebagai salah satu anggota dari Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (IG-SDF) yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam aspek pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan pasca tahun 2015.

Sustainable Development Goals pada sektor pariwisata telah mendapatkan dampak positif dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Sektor pariwisata saat ini telah menjadi perhatian dunia dan menjadikannya sebagai salah satu sektor unggulan dalam kebijakan publik yang kemudian diimplementasikan oleh berbagai negara- negara pada tingkat nasional maupun internasional. United Nation World Tourism Organization (UN-WTO) merupakan salah satu badan utama PBB yang berfokus pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. UN-WTO berkolaborasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab melalui *Global Code of Ethic for Tourism (GCET)*, *Sustainable Tourism Eliminating Poverty (ST-EP)*, *International Network of Sustainable Tourism Observatories (ISTO) Steering Committee Tourism and Development (SCTD)*. Melalui bantuan teknis UN-WTO memberikan bantuan kepada negara-negara dalam mengembangkan dan menerapkan strategis pariwisata berkelanjutan pada tingkat nasional. Oleh sebab itu kebijakan publik pada tingkat nasional maupun internasional harus mampu memberikan landasan yang kuat dan menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk tetap menjaga dan memajukan pariwisata berkelanjutan dalam semua kegiatan pariwisata.

Arah dan kebijakan dalam pembangunan nasional yang merupakan strategis kunci dari SDGs di tingkat negara sehingga harus ditingkatkan melalui kebijakan pariwisata yang dirancang dengan seksama dalam mendukung upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Sebagai perwujudan pembangunan internasional Indonesia menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui PERPRES no 59 tahun 2017 sebagai

perwujudan dari Sustainable Development Goals mengedepankan 4 (empat) pilar dengan 17 tujuan yang diimplementasikan sesuai dengan indikator nasional. Indikator yang telah ditetapkan akan mendapatkan perhatian khusus serta diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024. Upaya-upaya khusus ini dilakukan untuk memastikan target pembangunan wilayah sesuai dengan Sustainable Development Goals dan menggunakan indikator yang sama. Penentuan keasaman indikator ini untuk mempermudah Indonesia dalam proses pengimplementasian dan pencapaian SDGs ke kancah global. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025 tentang tujuan pembangunan nasional dalam jangka menengah tahun 2020-2024 yakni untuk mengembangkan seluruh masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui tindakan percepatan pembangunan pada berbagai bidang pariwisata dengan menekankan pada pembangunan perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang termasuk pariwisata di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sasaran tersebut diimplementasikan melalui investasi public yang berkualitas yaitu: tepat sasaran dan waktu sehingga dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dan konsisten dengan arah kebijakan. Program dan rencana pembangunan serta penggunaan sumber daya dan dana yang efisien. (RPJPN Nasional IV 2020-2024: 72)

Untuk mencapai tujuan pembangunan maka mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam pembangunan nasional sangat penting unruk dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya dalam menciptakan pembangunan nasional

yang berdaya saing di tingkat global serta mengidentifikasi kesesuaian goal dalam SDGs dengan prioritas pembangunan Nasional.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 (Renstra) melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Selanjutnya Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) dibentuk melalui PERPRES Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif salah satu lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia maka Kementerian/Lembaga hanya dapat memiliki satu Visi dan juga satu Misi, (Visi Misi Presiden) yang kemudian tertuang dalam beberapa poin. Visi pariwisata Indonesia adalah “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, Serta Selalu Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Di dalam Visi Presiden Republik Indonesia yang diimplementasikan oleh Kemenparekraf/Baparekraf terdapat 4 pilar utama yaitu:

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Maju.
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berdaya Saing.
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berkelanjutan.

4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Mengedepankan Kearifan Lokal.

Sementara itu, misi dari kementerian pariwisata termasuk:

1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Menciptakan kerangka ekonomi yang produktif dan berdaya Saing.
3. Pembangunan Indonesia yang adil dan merata dalam berbagai sektor.
4. Menciptakan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Menciptakan kemajuan budaya yang dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.
6. Penegakan hukum tanpa korupsi dan bermartabat.
7. Perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai rasa aman dan nyaman.
8. Pengelolaan sistem pemerintah yang transparan, bebas korupsi dan terpercaya.
9. Membangun koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka kesatuan NKRI (Rencana Strategi tahun 2020-2024).

Dalam konteks pembangunan dan juga pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif maka yang menjadi tujuan utama (*Strategic Goals*) bagi Kemenparekraf/Baparekraf dalam mengimplementasikan visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia adalah “*Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional*”. Kemudian pencapaian tujuan tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator utama yaitu: Yang Pertama, Nilai Devisa

Pariwisata. Kedua, Kontribusi PDB pariwisata. Ketiga: Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi bersama, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 (sebelas) sasaran strategi yang kemudian dipetakan ke dalam 4 (empat) perspective utama:

1. Perspektif *stakeholder*, di dalam perspektif ini Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategi yaitu meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.
2. Perspektif *Costumer*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategi yaitu:
 - a. Peningkatan dan pengembangan Ekraf Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas untuk mencapai pariwisata massal.
 - c. Meningkatkan kemampuan industri pariwisata nasional.
 - d. Mempersiapkan produk-produk wisata sesuai kebutuhan wisatawan.
 - e. Membangun relasi antara pemerintah dengan berbagai pihak dalam meningkatkan investasi serta pendanaan pariwisata nasional.
 - f. Melindungi dan meningkatkan kekayaan intelektual pada bidang pariwisata dan Ekraf Indonesia.
3. Perspektif *Internal Process*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategi diantaranya yaitu:
 - a. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian.

- b. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
4. Perspektif *learn and grow*, *terwujudnya reformasi birokrasi* Kemenparekraf menuju birokrasi yang profesional (Rencana Strategi Tahun 2020-2024).

Dalam mengimplementasikan suatu tujuan pembangunan, visi dan misi serta arah kebijakan merupakan patokan untuk mencapai tujuan yang telah menjadi target dalam Rencana Strategi suatu pemerintahan. Sama halnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pariwisata nasional, dimana untuk mencapai suatu keberhasilan pembangunan nasional dalam sektor pariwisata, pemerintah Indonesia pada *Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024* telah mendesain landasan kebijakan untuk menjadikan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi nasional. Arah dan kebijakan serta strategi ini dapat menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk merubah perjalanan atau kondisi sesuai dengan situasi lingkungan domestik maupun lingkungan internasional demi menciptakan pariwisata nasional yang berkualitas (*quality tourism experience*) berdaya saing dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Arah dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan 5 (lima) pilar strategis pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu:

1. Pilar destinasi pariwisata dan produk-produk Ekraf.

2. Pilar pemasaran pariwisata dan Ekraf.
3. Pilar Industri Pariwisata dan Ekraf.
4. Pilar Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata dan Ekraf.
5. Pilar Kreativitas.

Sementara itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh arah kebijakan pemerintah sebagaimana berikut ini:

1. Pembangunan destinasi wisata dan pengembangan produk-produk ekonomi kreatif nasional. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan tiga strategi utama:
 - a. Pengembangan produk Ekraf berbasis intelektual.
 - b. Peningkatan destinasi wisata yang telah diprioritaskan.
 - c. Verifikasi produk-produk pariwisata yang bernilai tinggi.
2. Pemasaran destinasi wisata dan Ekraf dengan meningkatkan kerjasama (strategic partnership). Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan empat strategi utama:
 - a. Pemasaran produk yang berfokus pada pasar yang potensial.
 - b. Perluasan pangsa pasar,
 - c. Peningkatan citra pada sektor-sektor pariwisata unggulan.
 - d. Pemanfaatan pemasaran digital.
3. Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata. Tiga Strategi yang digunakan adalah:

- a. Mengembangkan industri pariwisata pada bidang usaha.
 - b. Peningkatan tata kelola bidang pariwisata.
 - c. Menarik investasi atau pendanaan dari berbagai pihak.
4. Pengembangan SDM serta kelembagaan pariwisata untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berdaya saing. Dua strategi yang digunakan adalah:
- a. Pengembangan kurikulum pendidikan.
 - b. Pembangunan lembaga pariwisata dan pemanfaatan komunitas pariwisata Indonesia.
5. Memanfaatkan kreativitas anak bangsa yang berpotensi memberikan pengembangan Ekraf berbasis masyarakat. Dua strategi yang digunakan adalah:
- a. Peningkatan perlindungan terhadap hasil kreativitas.
 - b. Mendorong minat kreatif untuk menciptakan nilai tambah Ekraf berbasis budaya lokal.
6. Mendorong riset, inovasi, teknologi serta membangun kebijakan pariwisata yang berkualitas. Dua Strategi yang digunakan adalah:
- a. Mengembangkan riset terhadap pengembangan destinasi pariwisata dan produk-produk unggulan nasional yang dapat berorientasi pada peningkatan ekonomi Indonesia.
 - b. Pengelolaan kebijakan pariwisata sesuai kebutuhan pengunjung.

7. Mewujudkan birokrasi pemerintahan Kemenparekraf yang profesional.

Arah kebijakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pemerintah daerah termasuk oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam tesis ini. Tujuan kebijakan pembangunan Nusa Tenggara Timur mengarah kepada pengembangan potensi wilayah di beberapa bidang tertentu yakni: Pariwisata, Peternakan dan Perkebunan serta mempercepat tujuan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara.

Kebijakan yang dianggap strategis dalam pembangunan tersebut diterapkan ke dalam dua poin utama yaitu (i) pembangunan dan pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan serta makanan dan minuman dan (ii) pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pembangunan kawasan industri atau destinasi-destinasi pariwisata prioritas, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata nasional. Sejumlah kawasan pariwisata nasional yang tersebar di beberapa wilayah Nusa Tenggara termasuk DPP Lombok (Mandalika/ KEK Mandalika), DPP Labuan Bajo, TN/KSPN Gunung Rinjani, TWA Gunung Tunak, TN Komodo, TN Gunung Tambora, TN/KSPN Kelimutu serta taman wisata perairan dan kawasan-kawasan lain yang telah ditetapkan.

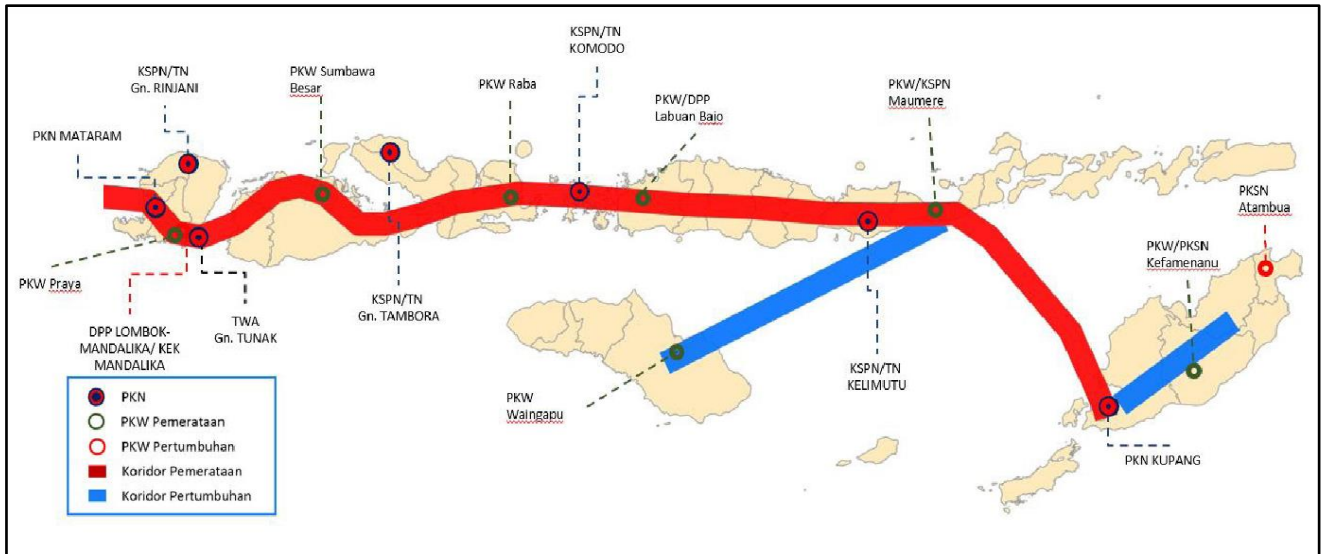
Selain itu, pembangunan dan pengembangan kota maupun pelabuhan yang ada di Provinsi NTB (Mataram) dan Provinsi NTT (Kupang) juga dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Salah satu contoh pengembangan kota pelabuhan adalah Atambua dan Kefamenanu serta wilayah-wilayah yang berada di

sekitarnya seperti pengembangan pedesaan, pembangunan desa terpadu, desa wisata, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan seperti Motaain sebagai bentuk dari pengetasan daerah-daerah 3T (Terluar, Tertinggal dan Termiskin. (RPJMN 2020-2024: 83).

Pengembangan proyek nasional unggulan di wilayah Nusa Tenggara merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi agenda global 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga menjadi bagian dari pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menerapkan dua Major Project dalam rangka Pemerataan Pembangunan Nasional (PPN) diantaranya pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara yang meliputi wilayah-wilayah yang berada di NTT seperti wilayah Kabupaten Kefamenanu dan sekitarnya, wilayah Kabupaten Atambua dan sekitarnya, wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Yang kedua adalah Major Project rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana di pulau Lombok dan semua kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara (RPJMN 2020-2024: 83).

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) maka Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 (dua) Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTT dari tahun 2015-2025 ditetapkan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Provinsi, 18 Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi serta 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

1.4.1 Gambar 1.1 Peta Arah dan Kebijakan Pembangunan NTT



Sumber gambar: (RPJMN 2020-2024)

Sejumlah destinasi pariwisata nasional yang terletak di NTT adalah:

- Komodo-Ruteng dan juga wilayah sekitarnya.
- Kelimutu-Maumere dan juga wilayah sekitarnya.
- Alor – Lembata dan juga wilayah sekitarnya.
- Kupang dan Rote Ndao dan juga wilayah sekitarnya.
- Sumba-Waikabubak dan juga wilayah sekitarnya.

Sementara itu, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang terletak di NTT meliputi Komodo, Kelimutu, Alor, Nemberala, dan Waikabubak Manutapeh Tana Daru. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai suatu acuan untuk perencanaan dan pembangunan setiap destinasi pariwisata yang ada di NTT dalam mendukung ekonomi nasional dengan mengimplementasikan 5 (lima) aspek yang dinilai mampu

untuk mendukung (RIPPARDA) yaitu 5A: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Akomodasi dan Awareness.

Sektor Pariwisata telah menjadi tren pembangunan di kancah internasional sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi nasional, pariwisata mengambil segi positif dalam mewujudkan pelestarian lingkungan, budaya dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Pariwisata Dunia Pariwisata berkelanjutan mendefinisikan bahwa “pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan berbagai dampak yaitu: Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan di masa depan yang dapat memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas tuan rumah. Selama dua dekade terakhir ini kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh pelaku pariwisata telah diakui dan mencerminkan praktik seperti ekowisata, pariwisata berbasis alam, pariwisata pusaka, wisata komunitas dan wisata pedesaan (UN-WTO 2019:18).

Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebenarnya menyangkut perencanaan serta pelestarian lingkungan yang meliputi berbagai penelitian dan analisis sebelum mengambil keputusan tentang penentuan arah dan kebijakan. Konsep pariwisata berkelanjutan secara konkrit harus melibatkan pembangunan ekonomi, social serta budaya yang memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan. Dalam Pembangunan berkelanjutan secara umum merupakan strategi yang dilakukan oleh sekelompok pelaku wisata dengan memperhatikan pengolahan sumber daya

sehingga dapat memperbarui suatu destinasi wisata sebagai bentuk dari kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi, budaya dan juga masyarakat setempat.

Ada empat prinsip utama dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Yang pertama prinsip kelestarian lingkungan.* Pada prinsip ini pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan proses ecology, keanekaragaman sumber daya hayati. *Yang kedua, prinsip keberlanjutan sosial.* Pada prinsip ini pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai kebudayaan komunitas setempat dan melestarikan identitas setempat. *Yang ketiga prinsip keberlanjutan.* Pada prinsip tersebut pembangunan budaya yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang berdampak pada penguatan jati dirinya. *Yang keempat prinsip keberlangsungan ekonomi.* Pada prinsip ini pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat untuk menyediakan biaya efektif dalam pengelolaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Sektor pariwisata harus mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan tiga target dari 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu poin 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, poin 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke 14 “Tentang Kehidupan di Bawah Air. Di Indonesia upaya peningkatan dan manfaat pengembangan pariwisata berkelanjutan telah diimplementasikan bagi masyarakat lokal di kota maupun di daerah-daerah dengan serius melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam

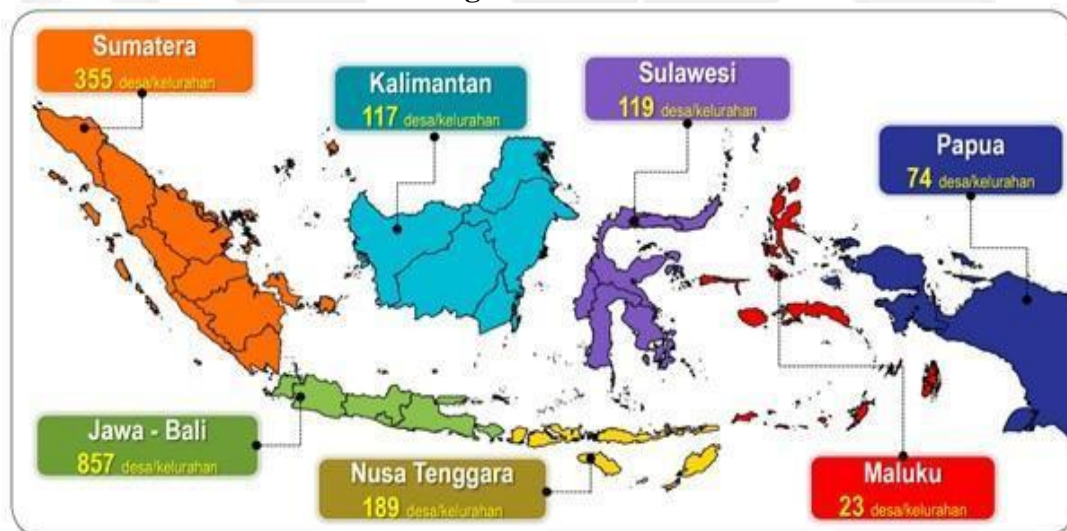
pengembangan ekonomi nasional berupa program-program tertentu seperti pengembangan Desa wisata, pembangunan daerah super prioritas dan pengembangan destinasi-destinasi yang berpotensi dengan harapan bahwa pembangunan berkelanjutan tersebut dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pengimplemantasian kebijakan ini telah dilakukan sejak tahun 1992 dan lebih lanjut ditekankan pada tahun 2006 dengan menerapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip pariwisata yang berbasis masyarakat. Pembangunan berkelanjutan di Desa wisata pada tahun 2014 mencapai 2000 yang dikembangkan dan telah mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. (Kemenpar dan ekonomi kreatif 2014-2019).

Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Desa Wisata saat ini menjadi tren dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan baik di di pulau-pulau besar maupun di pulau-pulau kecil karena di setiap pulau yang berada di Indonesia pasti dijumpai beragam adat, budaya serta potensi alam yang sangat berpotensi jika dikelola dan dikembangkan maka hal ini tentu akan memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi nasional. dari tahun ke tahun jumlah pembangunan desa wisata di Indonesia semakin bertumbuh pesat dan memberikan dampak nyata pada masyarakat setempat. Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 1.734 desa wisata di Indonesia dari total 83,931 desa yang tersebar di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersinergi

dengan Kementerian Kementrian Desa PDTT menargetkan penambahan jumlah desa wisata menjadi 10.00 pada tahun 2020.

Di level internasional, potensi sejumlah desa wisata yang berada di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari wisatawan internasional. Tahun 2019 terdapat 4 (empat) desa wisata diantaranya adalah: Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunung Kidul, Desa Penting Sari di Kabupaten Sleman, Desa Puteran di Kabupaten Buleleng Bali dan keunikan Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli Bali masuk kedalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi *Global Green Destination Days* (Desa Wisata Menjawab Tren Wisata Alternatif 2020).

Gambar 1.2 Pembangunan Desa Wisata



Sumber: Kementerian Desa PDTT tahun 2019. Sebaran Desa Wisata Tahun 2018

Dengan jangkauan dan dampaknya yang luas sektor ini dapat dinilai mampu berkontribusi secara langsung dan tidak langsung untuk pencapaian ke-17 SDGs, mulai dari menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan memberantas kemiskinan ekstrem hingga memerangi perubahan iklim, dari mendorong kesetaraan gender

hingga melestarikan laut dan darat sampai pada tahap ekosistem, mempromosikan dialog di antara beragam budaya hingga meningkatkan saling pengertian dan perdamaian. Namun, jika tidak dikelola dengan baik maka pariwisata juga dapat berkontribusi untuk menghancurkan aset budaya yang unik, merusak lingkungan dan mengganggu struktur sosial (UNDP 2008: 5).

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak positif pariwisata dan memitigasi potensi risikonya, seluruh komunitas pariwisata termasuk pembuat kebijakan, perusahaan, wisatawan, dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya, serta komunitas pembangunan pada umumnya perlu bekerja sama untuk mempromosikan konsep SDGs. Pemerintah perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang efektif dan kuat untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan; sektor swasta perlu menunjukkan komitmen penuhnya terhadap keberlanjutan dalam model bisnis inti dengan tindakan yang ditingkatkan; dan komunitas internasional perlu mengejar pendekatan yang lebih menguntungkan dan holistik dalam pembiayaan pariwisata untuk mewujudkan potensinya secara penuh sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Sebagai upaya bersama oleh UNWTO, UNDP dan mitra lainnya untuk menguraikan kaitannya dengan SDG dalam hal kebijakan publik, operasi sektor swasta, serta dalam pembiayaan internasional untuk menghasilkan pengetahuan, memberdayakan pemangku kepentingan, dan menginspirasi tindakan untuk sektor pariwisata untuk sepenuhnya merangkul pembangunan berkelanjutan dan agenda 2030.

Dalam agenda pembangunan pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Nawa Cita atau 9 (sembilan) agenda prioritas pada era pemerintahan Joko Widodo memiliki kesamaan prioritas dan target pembangunan yaitu mengutamakan pembangunan di daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata untuk menopang ekonomi masyarakat setempat. Melalui agenda tersebut Presiden Joko Widodo menetapkan 10 (sepuluh) destinasi wisata yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata nasional. Salah satu destinasi wisata ini terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Labuan Bajo di pulau Flores, NTT. Pembangunan pariwisata ini perlu adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peranan masyarakat, organisasi sosial dan organisasi dunia harus secara aktif dalam menentukan sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan, akuntabel dan efisien.

Gambar 1.3 Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas



Nusa Tenggara Timur memiliki wisata yang menjanjikan yaitu dari keunikan budaya dan keindahan alam tersebar di 34 Kabupaten. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 566 pulau, 246 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan terdapat 4 pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora) dan masih banyak pulau lainnya. Salah satu daerah di Provinsi NTT yang sedang mengalami perkembangannya ialah daerah Labuan Bajo yang berada Kabupaten Manggarai Barat. Perkembangan yang dialami kota Labuan Bajo saat ini sangat pesat, perkembangan itu terjadi di berbagai sektor namun salah satu yang menjadi sektor unggulan adalah Taman Nasional Komodo. Oleh karena itu pembangunan pariwisata super premium Taman Nasional Komodo sebagai bentuk perwujudan dari konsep Pembangunan Berkelanjutan harus dilihat sebagai peluang bagi pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun nasional dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi serta memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, mempromosikan dan melestarikan budaya lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjadi agenda global, tak mengherankan jika SDGs membidik setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan berkelanjutan seperti masalah sosial, lingkungan dan budaya. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tersebut pariwisata juga merupakan salah satu sektor penting yang digunakan untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pariwisata internasional yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir

dengan perbaikan teknologi, peningkatan standar hidup dan proses globalisasi menjadikan peningkatan pesat dalam jumlah pengunjung wisatawan. Namun demikian, masalah utama adalah bagaimana proses perluasan pariwisata global saat ini tanpa harus menciptakan ketimpangan? Penulis berpendapat bahwa penting untuk melihat dengan cermat bagaimana interaksi antara global dan lokal dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan bagi individu, komunitas tuan rumah dan wilayah sekitarnya. Pariwisata dalam istilah sederhana, harus dilihat sebagai proses transaksi yang sekaligus didorong oleh prioritas global maupun lokal.

Institusi global seperti IMF, World Bank, UNWTO telah memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan ekonomi, investasi dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di sebagian besar dunia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi suatu pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai masalah serius, misalnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, kekurangan air bersih dan ketimpangan social. Oleh sebab itu, pengembangan kerjasama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) baik di tingkat lokal maupun global merupakan indikator yang penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melindungi lingkungan serta menciptakan kesejahteraan pada segala aspek kehidupan. Pembangunan kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan NGO yang bisa ditempuh dengan berbagai cara yaitu bilateral, trilateral maupun multilateral dengan menggunakan diplomasi sebagai instrument utama. Dengan demikian, penulis telah berupaya melakukan sebuah penelitian tentang

hubungan antara pembangunan berkelanjutan, diplomasi dan pariwisata dengan judul **“STRATEGI DIPLOMASI PARIWISATA PREMIUM PULAU KOMODO SEBAGAI PERWUJUDAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO.”**

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Bagaimana strategi diplomasi yang ditempuh oleh pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur?
- 2) Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata premium Pulau Komodo?
- 3) Apa dampak dari Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Super Premium Pulau Komodo terhadap masyarakat setempat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi dan strategi diplomasi pemerintah dalam pengembangan wisata premium Taman Nasional Komodo (TNK) dengan tetap memperhatikan struktur pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap konsep pembangunan berkelanjutan pariwisata super premium di Pulau Komodo sebagai perwujudan dari Sustainable Development Goals yang telah menjadi agenda PBB dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti dengan prosedur ilmiah sehingga dapat mempunyai manfaat yang positif dalam bidang pendidikan serta pengembangan pariwisata Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua kalangan akademisi di Universitas Pelita Harapan Khususnya dan umumnya di Indonesia. Disamping itu penulis ingin sekali memberikan sumbangan pemikiran, ide atau gagasan-gagasan baru terhadap pengembangan Ilmu Hubungan Internasional dalam konteks pembangunan internasional dengan menggunakan perspektif Neoliberal yang mengedepankan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dapat menopang ekonomi suatu negara dengan menggunakan pariwisata sebagai instrument. Secara praktis penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari pulau Miangas sampai pulau Rote dalam mengeksplorasi pariwisata Indonesia melalui konsep pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi agenda global.